



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 731 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 64
TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan regulasi di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 60);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 563 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2025.

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025 pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 731 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
 BANTUL TAHUN 2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2025

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
1	Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi	Perubahan pada Lampirannya berkaitan dengan perubahan atas pedoman penilaian dan kriteria verifikasi berkas usulan peserta oleh Sekretariat KPP dan perubahan atas kategori kejuaraan	Triwulan I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Penyesuaian dengan perolehan suara pemilu tahun 2024	Triwulan I	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan I	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Mengatur mengenai perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan I	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
5	Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029	a. definisi-definisi; b. potensi bencana; c. penyusun; d. sistematika; dan e. mekanisme evaluasi.	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	a. definisi-definisi; b. tujuan penyusunan; c. bahan untuk menyusun; d. masa berlaku; e. penyusun dan pelaksana; f. sistematika; g. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang; dan h. pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Pelaksanaan pemilihan b. masa dan tata cara kerja c. pelaporan proses pemilihan dan pelaporan hasil kerja unsur pengarah; dan d. pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari	a. Penggolongan Pelanggan b. Tarif Pelayanan Air Minum c. Prosedur Berlangganan	Triwulan I	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
9	Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan	Sistem dan Kapasitas untuk Kewaspadaan dan Respon : Koordinasi Kedaruratan, Surveilans Kolaboratif, Perlindungan masyarakat, Respon Medis / Manajemen klinis	Triwulan I	Dinas Kesehatan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
10	Hasil Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produksi Usaha Daerah	perubahan tarif terkait dengan penjualan produksi usaha daerah dan rumah pemotongan hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Triwulan I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Penyelenggaraan Satu Data	mengakomodir perubahan terkait dengan materi manajemen akses	Triwulan I	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Koperasi dan Pelindungan Koperasi Tahun 2025-2027	a. Program dan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025-2027 b. Peran stakeholder dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang terwadai dalam tim c. Target dan output pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Triwulan I	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
13	Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2025-2029	a. target; b. strategi; dan c. kegiatan.	Triwulan I	Dinas Lingkungan Hidup
14	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025	a. Pembagian besaran ADD masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan ADD; c. Cara Penghitungan ADD; d. Mekanisme Pencairan ADD;	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
15	Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	menyesuaikan peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan serta oenyesuaian ruang lingkup	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
16	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Mengatur mengenai perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan I	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
17	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan dalam Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia Pemberdayaan Masyarakat	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, , merubah peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan dan merubah peruntukan pergeseran pasukan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
18	Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Pemerintah Kalurahan	Mengakomodir mengenai perumusan, penetapan, internalisasi, penerapan dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik Pemerintahan Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
19	Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksud dan tujuan pemberian insentif b. Kriteria penerima insentif c. Pengajuan, pembayaran dan pertanggungjawaban d. Pengembalian insentif e. Pembinaan dan pengawasan insentif 	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran	<ul style="list-style-type: none"> a. pola Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif c. tata cara penambahan pembantu Juru Parkir d. tata cara permohonan izin e. tata cara tindakan penertiban dan pengenaan denda administratif f. mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan 	Triwulan I	Dinas Perhubungan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
21	Program Boga Sehat	a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana atau pengampu program Boga Sehat telah berubah nomenklaturnya; b. Dasar hukum yang termuat sebagian telah dicabut atau mengalami perubahan; c. Penggantian sasaran penerima manfaat; d. Penambahan detail pada mekanisme pelaksanaan, mekanisme pendataan, serta mekanisme penggantian dan/atau pemberhentian penerima manfaat; dan e. Penambahan peraturan terkait kualitas menu makanan Boga Sehat.	Triwulan I	Dinas Sosial
22	Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	mengatur mengenai pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2024	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
23	Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	a. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan b. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan c. Pendanaan	Triwulan I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
24	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan	mengatur mengenai perubahan pengaturan terkait dengan jenis hukuman disiplin, mekanisme pengajuan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dan mekanisme pemberhentian staf Kalurahan.	Triwulan I	Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
25	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	mengatur mengenai syarat, mekanisme dan besaran tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas	Triwulan I	Bagian Organisasi
26	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Mengatur mengenai perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan I	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
27	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Mengatur mengenai perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan I	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
28	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	Perubahan pada Lampirannya berkaitan dengan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan	Triwulan II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	a. penambahan satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak b. penyesuaian tugas dan fungsi satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak	Triwulan II	Bagian Organisasi

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
30	Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Non ASN b. Prosedur Pengadaan Pegawai Non ASN c. Penilaian Kinerja Pegawai Non ASN d. Penghasilan Pegawai Non ASN e. Pengembangan Kompetensi Pegawai Non ASN f. Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai Non ASN g. Pemberian Cuti Bagi Pegawai Non ASN h. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja i. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non ASN 	Triwulan II	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
31	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Anggaran BLUD b. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran d. Pelaksanaan Anggaran BLUD e. Pengelolaan Kas, Belanja, Persediaan dan Aset f. Pengelolaan Utang dan Piutang BLUD g. Pengelolaan Investasi BLUD h. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran i. Surplus dan Defisit BLUD j. Penyelesaian Kerugian k. Akuntansi dan Pelaporan 	Triwulan II	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
32	Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan b. Prosedur pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan c. Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting d. persyaratan dan mekanisme pelaporan e. sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan 	Triwulan II	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
33	Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan	a. Pembagian besaran BHR masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan BHR; c. Cara Penghitungan BHR; d. Mekanisme Pencairan BHR;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
34	Pedoman Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Fasilitas Umum dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2025	a. Pembagian Besaran masing-masing Kalurahan; b. Cara Penghitungan dana kompensasi; c. Mekanisme pencairan dana kompensasi	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
35	Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan	a. Pembagian besaran BHP masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan BHP; c. Cara Penghitungan BHP; d. Mekanisme Pencairan BHR;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
36	Koperasi Desa Merah Putih	Mengatur mengenai Definisi Koperasi Desa Merah Putih, Bentuk pemberdayaan dan perlindungan, Pembagian tugas antar stakeholder, Evaluasi, Pembentukan Satgas.	Triwulan II	
37	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan	Mengatur mengenai unsur keanggotaan, hak, pemberhentian, dan pengaturan antar waktu Dewan Kebudayaan	Triwulan II	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
38	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara.	Triwulan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
39	Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam pelaporan keuangan sehingga perlu dicabut dan diganti	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
40	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 b. pedoman penyusunan dokumen dan kebijakan tahun 2026 c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
41	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2026 b. Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
42	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	a. Perubahan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 b. pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
43	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	a. Perubahan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025 b. Tindak lanjut penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2035	a. tujuan dan sasaran GDPK b. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
45	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerja Sama b. Mitra Kerja Sama c. Tahapan Kerja Sama d. Berakhirnya Kerja Sama 	Triwulan III	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
46	Batas Kalurahan Guwosari	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan 	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
47	Batas Kalurahan Sendangsari	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan 	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
48	Batas Kalurahan Triwidadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan 	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
49	Batas Kalurahan Argodadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
50	Batas Kalurahan Argosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
51	Batas Kalurahan Argorejo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
52	Batas Kalurahan Argomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
53	Batas Kalurahan Bangunjiwo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
54	Batas Kalurahan Tamantirto	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
55	Batas Kalurahan Tirtonirmolo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
56	Batas Kalurahan Ngestiharjo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
57	Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	a. Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau b. Kriteria Penerima BLT DBH-CHT c. Mekanisme Penyaluran BLT DBH-CHT	Triwulan III	Dinas Sosial

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
58	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024	Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
59	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	mengatur mengenai maksud dan tujuan, strategi pengendalian kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, dan pembinaan dan pengawasan	Triwulan III	Inspektorat Daerah
60	Pedoman Pembentukan Produk Hukum Kalurahan	Mengatur mengenai jenis Produk Hukum Kalurahan dan tata cara pembentukan Produk Hukum Kalurahan	Triwulan III	Bagian Hukum
61	Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	Mengatur mengenai sasaran dan mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan sosial untuk program penanganan kemiskinan ekstrem	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
62	Standar Harga Satuan	Pedoman standardisasi harga barang dan jasa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi Perangkat Daerah yang memuat, antara lain: a. Komponen standar biaya umum; b. komponen standar satuan harga; c. komponen satuan pokok kegiatan; dan d. komponen analisa standar biaya untuk konstruksi dan non konstruksi	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
63	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul	mengatur mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan di Kabupaten Bantul	Triwulan III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
64	Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 133 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan	Mengatur mengenai perubahan lokasi dan izin, perubahan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pendirian SD dan SMP serta Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan izin pendirian	Triwulan III	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
65	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
66	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
67	Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah	mengatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan, peserta didik, tugas dan tanggung jawab, pendanaan, serta ketentuan penutup	Triwulan III	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
68	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026	mengatur mengenai ketentuan umum, pedoman penyusunan, dan ketentuan penutup	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
69	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	mengubah terkait dengan tanda nomor kendaraan dinas bagi perorangan dan pejabat terkait	Triwulan IV	Bagian Umum dan Protokol
70	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	a. tindak lanjut penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Triwulan IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
71	Pedoman Tata Naskah Dinas	a. Pengaturan jenis dan penyusunan naskah dinas b. Penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas c. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar d. Pengurusan naskah dinas korespondensi	Triwulan IV	Bagian Organisasi

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
72	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip pemberian TPP b. Tujuan pemberian TPP c. Kriteria pemberian TPP d. Penghitungan besaran pemberian TPP e. Sasaran pemberian TPP f. Indikator pemberian TPP g. Pelaksanaan pemberian TPP h. Pendanaan i. Ketentuan peralihan 	Triwulan IV	Bagian Organisasi
73	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati	Penatausahaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Triwulan IV	Bagian Perencanaan Keuangan
74	Batas Kalurahan Seloharjo	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan 	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
75	Batas Kalurahan Panjangrejo	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan 	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
76	Batas Kalurahan Srihardono	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan 	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
77	Batas Kalurahan Sidomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
78	Batas Kalurahan Sumbermulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
79	Batas Kalurahan Mulyodadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
80	Batas Kalurahan Parangtritis	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
81	Batas Kalurahan Donotirto	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
82	Batas Kalurahan Tirtomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
83	Batas Kalurahan Tirtohargo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
84	Batas Kalurahan Tirtosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
85	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pedoman untuk memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
86	Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2025	Mengakomodir perubahan harga komponen yang ada dalam SHBJ	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
87	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	mengakomodir pengaturan mengenai Opsen Pajak	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
88	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Mengatur mengenai maksud dan tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, norma standar prosedur dan kriteria, koordinasi dan harmonisasi, penyebarluasan data, dan pembinaan monitoring dan evaluasi	Triwulan IV	Dinas Komunikasi dan Informatika
89	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
90	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
91	Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Mengatur Tata cara Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol, tata cara Perizinan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol, menegaskan Larangan Penjualan ke anak dibawah umur dan penjualan minuman beralkohol secara daring/online, dan mengatur tata cara pemberian sanksi administratif	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
92	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
93	Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak Lahan Produksi Pangan dan Ternak Berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Basah	Mengatur mengenai syarat dan mekanisme pemberian pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Triwulan IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
94	Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Sambung Pangan Bantul untuk Program Penanggulangan Kemiskinan	Mengatur mengenai mekanisme penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial Sambung Pangan Bantul	Triwulan IV	Bagian Organisasi
95	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah	Mengatur mekanisme pemberian TPP bagi Pegawai ASN untuk bulan Desember Tahun 2025	Triwulan IV	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
96	Garis Sempadan	Mengatur garis sempadan sungai, garis sempadan pantai, garis sempadan jalan, garis sempadan rel kereta api, garis sempadan mata air/embung, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan cagar budaya, garis sempadan SUTT, garis sempadan SUTET, dan garis sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Gas	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
97	Tata Kelola Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah	Mengatur mengenai tata Kelola dan penyajian laporan keuangan terkait dengan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah	Triwulan IV	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH